



Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota pada Provinsi Banten 2020-2024

The influence of regional taxes, regional levies, and the results of separated wealth management on the level of financial independence of districts/cities in Banten Province 2020-2024

Rizka Nabila Rahman^{*}, Devianti Yunita Harahap
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten pada periode 2020–2024.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu regresi data panel yang didukung oleh wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Populasi penelitian mencakup delapan kabupaten/kota dengan teknik sampel jenuh. Setelah uji outlier menggunakan metode Z-Score, diperoleh 32 observasi yang dianalisis menggunakan Fixed Effect Model (FEM) pada EViews 12.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi secara simultan berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 93,88% menunjukkan kemampuan model yang tinggi, yang juga dipengaruhi oleh efek tetap pada masing-masing daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan keuangan, efisiensi belanja, serta optimalisasi potensi daerah.

Keterbatasan penelitian – Secara empiris, ruang lingkup penelitian ini terbatas secara geografis pada Provinsi Banten dan hanya mengobservasi periode spesifik (2020-2024) yang diwarnai oleh ketidakstabilan ekonomi makro. Selain itu, variabel independen murni difokuskan pada tiga instrumen PAD, sehingga masih banyak faktor determinan lain, seperti dana perimbangan pusat atau efisiensi belanja daerah, yang belum dimasukkan dalam pemodelan regresi ini.

Implikasi – Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa realisasi kemandirian keuangan tidak bisa sekadar bertumpu pada pencapaian target pendapatan secara nominal. Implikasi kebijakan yang disarankan menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pungutan secara komprehensif, mengelola anggaran secara efisien, memperbaiki tata kelola BUMD, serta mempercepat adopsi teknologi digital guna menyempurnakan sistem administrasi dan pencatatan pendapatan daerah.

Kebaruan – Orisinalitas penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan mixed methods dalam mengevaluasi determinan kemandirian keuangan daerah. Ketika mayoritas studi terdahulu hanya bergantung pada pengujian tren kuantitatif, penelitian ini memadukan validitas model statistik tingkat tinggi dengan konfirmasi empiris berbasis wawancara kualitatif langsung dari praktisi (Bapenda), sehingga menghasilkan pemahaman yang jauh lebih faktual, kaya, dan kontekstual mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah di lapangan.

Kata Kunci: PAD, Kemandirian Keuangan Daerah, Mixed Methods

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Levies, and Separated Asset Management Results on Regional Financial Independence in regencies/cities in Banten Province for the 2020–2024 period.

Design/methodology/approach – The study employed a mixed-methods approach, namely panel data regression supported by interviews with the Banten Province Regional Revenue Agency. The study population included eight regencies/cities using a saturated sampling technique. After testing for outliers using the Z-score method, the study obtained 32 observations, which were analyzed using the Fixed Effects Model (FEM) in EViews 12.

Findings – The results indicate that the three independent variables have no significant effect on Regional Financial Independence, but simultaneously have a significant effect. The Adjusted R-Squared value of 93.88% indicates high model capability, which is also influenced by fixed effects in each region. These findings indicate that Regional Financial Independence depends not only on the size of Regional Original Revenue (PAD), but also on financial management effectiveness, spending efficiency, and optimization of regional potential.

Research limitations – Empirically, this study is geographically limited to Banten Province and covers only a specific period (2020-2024) marked by macroeconomic instability. Furthermore, the independent variables focus only on three PAD instruments, so many other determinants, such as central government balance funds or regional spending efficiency, are not included in this regression model.

Implications – Practically, the results of this study signal to local governments that achieving financial independence cannot rely solely on meeting nominal revenue targets. The suggested policy implications require local governments to comprehensively optimize levies, manage budgets efficiently, improve regional-owned enterprise (BUMD) governance, and accelerate the adoption of digital technology to enhance regional revenue administration and recording systems.

Originality – This study's originality lies in its mixed-methods approach to evaluating the determinants of regional financial independence. While most previous studies rely solely on quantitative trend testing, this study combines the validity of high-level statistical models with empirical confirmation from direct qualitative interviews with practitioners (Bapenda), resulting in a more factual, rich, and contextual understanding of the dynamics of regional financial management in the field.

Keywords: PAD, Regional Financial Independence, Mixed Methods

Histori Artikel:

Diterima: 21 Juli 2026, Direvisi: 12 Agustus 2026, Disetujui: 19 Agustus 2026, Dipublikasikan: 21 September 2026.

***Penulis Korespondensi:**

rizka22008@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1415>

PENDAHULUAN

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempertegas bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Fungsi dibentuknya daerah otonom ialah agar daerah dapat mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri, namun kenyataannya dari tahun ke tahun pemerintah pusat harus mengeluarkan dana transfer yang semakin tinggi. Permasalahan itu menandakan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Permasalahan tersebut dapat dibuktikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Transfer Pusat ke Daerah

Keterangan	Nominal	
Transfer ke Daerah 2024	Rp	786.591.700.000.000
Transfer ke Daerah 2023	Rp	755.504.900.000.000
Transfer ke Daerah 2022	Rp	748.328.700.000.000
Transfer ke Daerah 2021	Rp	713.853.900.000.000
Transfer ke Daerah 2020	Rp	691.429.660.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (diolah)

Tabel 1 mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat belum menurun secara signifikan, sekalipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini tampak nyata di Provinsi Banten. Meskipun struktur pendapatan daerahnya masih didominasi oleh PAD dibandingkan dengan dana perimbangan, kontribusi komponen nonpajak di dalam PAD masih rendah dan cenderung fluktuatif. Pajak daerah konsisten menjadi penopang utama, meningkat dari Rp5,66 triliun (2020) menjadi Rp8,55 triliun (2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan antara amanat regulasi dan capaian aktual pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menegaskan bahwa keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, efisien, dan bertanggung jawab, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah. Rendahnya kontribusi retribusi daerah mengindikasikan lemahnya optimalisasi pungutan atas jasa publik, sementara fluktuasi HPKYD mengindikasikan lemahnya tata kelola aset dan investasi daerah melalui BUMD. Tanpa pemahaman empiris atas peran ketiga komponen PAD ini, upaya penguatan kemandirian keuangan daerah berisiko tidak menysasar akar persoalan yang sebenarnya.

Kajian terdahulu memperlihatkan hasil yang tidak konsisten atas hubungan antara komponen PAD dan kemandirian keuangan daerah, sehingga membuka research gap yang relevan untuk ditindaklanjuti. Nugraheni *et al.*, (2020) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Hidayah dan Nur (2024) menunjukkan bahwa pajak daerah memang memengaruhi PAD, tetapi pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah tidak signifikan. Sementara itu, retribusi daerah, baik Hidayah dan Nur (2024) maupun Nainggolan *et al.*, (2023) sama-sama menyimpulkan tidak adanya pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, untuk HPKYD, Adilah (2018) melaporkan adanya pengaruh, dan Saputra *et al.*, (2025) menegaskan HPKYD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Inkonsistensi temuan antarvariabel dan antarkonteks penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ketiga komponen PAD terhadap kemandirian keuangan daerah masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada konteks daerah dan periode yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada tiga aspek. Pertama, cakupan wilayah difokuskan pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, provinsi dengan tingkat pendapatan daerah relatif tertinggal dibandingkan dengan empat provinsi di Pulau Jawa, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dibandingkan studi berskala nasional. Kedua, periode penelitian 2020-2024 mencakup fase awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga menangkap dinamika kebijakan hubungan keuangan pusat-daerah yang relatif belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan desain mixed-methods eksplanatoris sekuensial, yaitu mengombinasikan hasil regresi data panel dengan wawancara kualitatif dengan Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) pada kabupaten/kota dengan kemandirian keuangan tertinggi dan terendah, guna menjelaskan mekanisme di balik temuan kuantitatif, sebuah pendekatan yang jarang digunakan pada penelitian sejenis yang umumnya bersifat kuantitatif murni. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKYD, baik secara parsial maupun simultan, terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2020-2024.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dari sumber pendapatan sendiri, tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, HPKYD, dan lain-lain PAD yang sah berperan sebagai indikator utama kapasitas fiskal daerah. Semakin besar dan stabil kontribusi komponen-komponen PAD, semakin tinggi pula potensi kemandirian keuangan daerah yang dapat dicapai. Pajak daerah merupakan komponen PAD dengan kontribusi terbesar dan paling konsisten pada struktur pendapatan Provinsi Banten. Pajak daerah yang dikelola secara optimal mencerminkan kepatuhan wajib pajak sekaligus efektivitas pemungutan oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas daerah untuk membiayai belanjanya sendiri. Merujuk pada temuan Nugraheni *et al.*, (2020), penelitian ini merumuskan:

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Sekalipun kontribusinya terhadap PAD relatif kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi yang dikelola secara optimal tetap berpotensi memperkuat pendapatan mandiri daerah. Mempertimbangkan bahwa retribusi daerah pada Provinsi Banten cenderung fluktuatif dan bernilai kecil, penelitian ini merumuskan:

H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

HPKYD merupakan hasil dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD maupun entitas lain yang berbentuk dividen atau bagi hasil laba. Sebagai sumber pendapatan yang bersifat lebih berkelanjutan, kontribusi HPKYD yang tinggi dan stabil dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah, sementara kontribusi yang rendah dan fluktuatif sebagaimana teramati pada data Provinsi Banten mengindikasikan kinerja pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Merujuk pada temuan Adilah (2018) dan Saputra *et al.*, (2025), penelitian ini merumuskan:

H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sebagai komponen-komponen pembentuk PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKYD diperkirakan bekerja secara bersama-sama dalam memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga penelitian ini juga merumuskan hipotesis simultan:

H4: Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif pada tahap awal dan pendekatan kualitatif pada tahap lanjutan. Tahap kuantitatif dilakukan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (HPKYD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten melalui analisis regresi data panel. Hasil kuantitatif tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui tahap kualitatif berupa wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten guna menggali faktor-faktor kontekstual yang menjelaskan mengapa suatu variabel berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemilihan desain ini didasarkan pada karakteristik fokus penelitian yang tidak cukup dijawab hanya melalui angka statistik. Analisis regresi data panel mampu mengukur besaran dan arah pengaruh masing-masing komponen PAD secara empiris, namun tidak dapat menjelaskan mekanisme di balik hasil tersebut, seperti apa penyebab retribusi daerah cenderung tidak berpengaruh signifikan, dan sebagainya. Tahap kualitatif berperan melengkapi keterbatasan tersebut dengan menggali penjelasan langsung dari pihak pengelola keuangan daerah, sehingga hasil akhir penelitian tidak hanya bersifat deskriptif-statistik, tetapi juga kontekstual dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

Jenis Penelitian dan Variabel Penelitian

Pada tahap kuantitatif, penelitian ini yang bertujuan menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui data panel, yaitu gabungan data time series (2020-2024) dan cross section (delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten). Jenis penelitian ini relevan digunakan karena tujuan penelitian adalah mengukur ada tidaknya serta besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKYD terhadap kemandirian keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan, yang hanya dapat dijawab melalui pengujian hipotesis berbasis data numerik.

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pajak daerah (X_1) diukur melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD; retribusi daerah (X_2) diukur melalui perbandingan realisasi retribusi daerah terhadap total PAD; dan HPKYD (X_3) diukur melalui perbandingan realisasi HPKYD terhadap total PAD, mengacu pada indikator Siagian dan Kurnia (2022). Variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah (Y), diukur melalui perbandingan PAD terhadap total transfer pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman daerah, mengacu pada indikator Kawatu (2019). Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk rasio persentase (%) dan diperoleh dari data yang sama, yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Data dan Sumber Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang berjumlah delapan wilayah. Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (sensus), yaitu melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih representatif dan bebas dari bias pemilihan sampel. Dengan periode pengamatan lima tahun (2020-2024), total observasi yang digunakan berjumlah 40 data panel (8 kabupaten/kota x 5 tahun).

Data yang digunakan pada tahap kuantitatif adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten yang diperoleh melalui dokumentasi dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten. Data sekunder dipilih karena telah diaudit sehingga memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk mengukur realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, HPKYD, dan PAD secara akurat. Adapun data pada tahap kualitatif merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di Bapenda pada kabupaten/kota terpilih, guna memperoleh penjelasan mendalam atas fenomena yang teridentifikasi dari hasil pengolahan data kuantitatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan secara bertahap menggunakan perangkat lunak EViews. Tahap pertama adalah pengujian outlier menggunakan metode Z-Score, di mana data dengan nilai Z-Score lebih besar dari +2,5 atau lebih kecil dari -2,5 dikategorikan sebagai outlier dan dikeluarkan dari sampel agar tidak mengganggu keakuratan hasil estimasi yang berfungsi untuk melihat pola utama dalam data dan apakah terdapat beberapa fitur yang tampak tidak sesuai, yaitu menyimpang secara signifikan dari pola yang seharusnya (Perron, 2026:55). Selain itu, agar data terbebas dari normalitas. Tahap kedua adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi pada setiap variabel.

Tahap ketiga adalah pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai melalui tiga pengujian bertahap, yaitu *Chow Test* untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), *Hausman Test* untuk memilih antara FEM dan REM, serta *Lagrange Multiplier Test* untuk memilih antara CEM dan REM apabila diperlukan. Model terpilih selanjutnya diuji melalui uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas (Jarque-Bera), uji multikolinearitas (matriks korelasi antarvariabel), uji heteroskedastisitas (uji Glejser), dan uji autokorelasi (uji Durbin-Watson), untuk memastikan model regresi bersifat valid (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Tahap akhir analisis kuantitatif adalah pengujian hipotesis melalui uji statistik t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji statistik F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen, serta uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan pengaruh signifikan maupun tidak signifikan pada tahap ini menjadi dasar dalam menyusun pedoman wawancara pada tahap kualitatif.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atas hasil wawancara dengan Bapenda. Jawaban narasumber dianalisis secara tematik dan dikaitkan langsung dengan temuan kuantitatif pada masing-masing variabel, sehingga penelitian ini tidak hanya mampu menjawab seberapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKYD terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor di balik pengaruh tersebut secara kontekstual pada kabupaten/kota di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Outlier

Sebelum dilakukan estimasi model regresi, data penelitian yang berjumlah 40 observasi diperiksa melalui uji outlier menggunakan metode Z-Score. Hasil pengujian mengidentifikasi delapan observasi dengan nilai Z-Score di luar rentang $\pm 2,5$ atau nilai yang memiliki penyimpangan terlalu jauh seperti yang dijelaskan oleh Perron (2026). Hasil pengujian tersebut mengharuskan data tersebut dikeluarkan dari sampel dan analisis selanjutnya menggunakan 32 observasi data panel selama periode 2020-2024.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (X_3), serta variabel dependen, yaitu kemandirian keuangan daerah (Y). Hasil analisis statistik deskriptif dari 32 observasi data panel selama periode 2020–2024.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

1. Hasil Uji Chow

Tabel 2. Uji CHOW

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
Cross-Section F	13.906484	(7,21)	0,0000
Cross-Section Chi-Square	55.330719	7	0,0000

Sumber : Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

2. Hasil Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>ChiSq.Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
Cross-Sectional Random	8.339589	3	0,0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$, maka model yang terpilih *Fixed Effect Model*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model estimasi regresi data panel. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X₃) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hasil estimasi FEM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t.statistic</i>	<i>Prob.</i>
Constant	1,54090	0,69494	2,21715	0,0378
Pajak Daerah (X ₁)	-0,57471	0,76183	-0,75438	0,4590
Retribusi Daerah(X ₂)	-2,11596	2,06514	-1,02460	0,3172
HPKYD (X ₃)	-18,7091	12,11870	-1,55050	0,1360

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

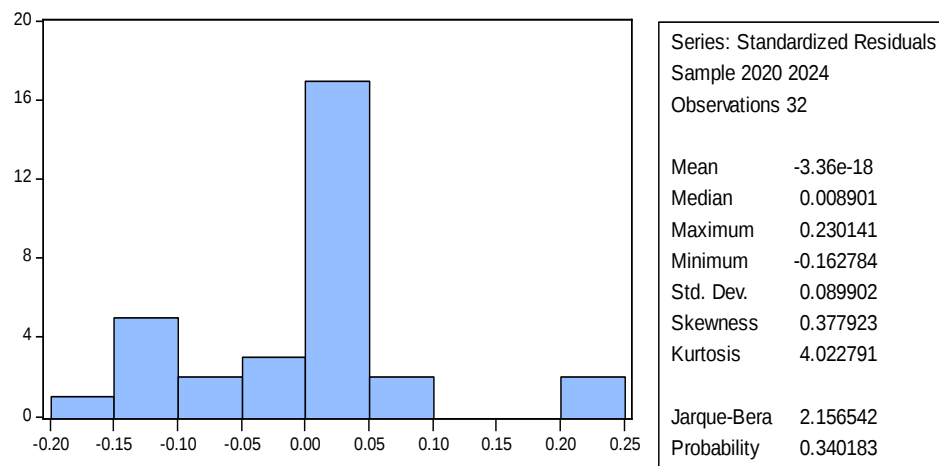
Pada Tabel 4, hasil analisis regresi linier berganda dari model FEM dapat diartikan pada penjelasan di bawah ini :

1. Konstanta (C) sebesar 1,5409 menunjukkan bahwa ketika X₁, X₂, dan X₃ bernilai nol, maka nilai Y diprediksi sebesar 1,5409.
2. Koefisien X₁ sebesar -0,5747 menunjukkan hubungan negatif. Setiap peningkatan X₁ sebesar satu satuan akan menurunkan Y sebesar 0,5747 satuan.
3. Koefisien X₂ sebesar -2,1160 menunjukkan hubungan negatif. Setiap peningkatan X₂ sebesar satu satuan akan menurunkan Y sebesar 2,1160 satuan.
4. Koefisien X₃ sebesar -18,709 menunjukkan hubungan negatif. Setiap peningkatan X₃ sebesar satu satuan akan menurunkan Y sebesar 18,709 satuan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini menggunakan Uji Normalitas Jarque-Bera dengan hasil pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera berada di atas 0,05, yaitu sebesar 0,340183. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012(2026)

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Pada saat melakukan Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada dan tidak adanya korelasi antar variabel bebas dengan melihat standar jika nilai korelasi antar variabel di bawah 0,90 maka model terbebas dari multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Pajak Daerah (X1)	Retribusi Daerah (X2)	HPKYD (X3)
Pajak Daerah (X1)	1,00000	-0,66673	-0,75671
Retribusi Daerah (X2)	-0,66673	1,00000	0,72832
HPKYD (X3)	-0,75671	0,72832	1,00000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 di atas, dijelaskan bahwa:

1. Nilai koefisien korelasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar (-0,7) lebih kecil dari nilai IVF sebesar 0,9.
2. Nilai koefisien korelasi antara Pajak Daerah dengan HPKYD sebesar (-0,8) lebih kecil dari nilai IVF sebesar 0,9.
3. Nilai koefisien korelasi antara Retribusi daerah dan HPKYD sebesar (0,7) lebih kecil dari nilai IVF sebesar 0,9.

Melihat hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada data penelitian.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser. Model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas (Sig.) > 0,05. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
Pajak Daerah (X1)	-0,37433	0,26038	-1,43764	0,1653
Retribusi Daerah (X2)	-0,62243	0,70584	-0,88183	0,3879
HPKYD (X3)	-3,40147	4,14203	-0,82121	0,4208

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Merujuk pada hasil pengujian pada Tabel 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas > 0,05 pada semua variabel.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi, peneliti menggunakan model Durbin-Watson (DW) untuk menentukan apakah data bebas dari autokorelasi atau tidak. Nilai dL dan dU dapat dilihat dari tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian menghasilkan statistik Durbin-Watson 2,53237 dengan sampel (n) 32 dan variabel independen (k) sebanyak tiga. Didapatkan dL sebesar 1,2437 dan dU sebesar 1,6505.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi berganda (R^2) dilaksanakan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R-Squared</i>	0,93880
---------------------------	---------

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,93880, yang menunjukkan bahwa sebesar 93% variasi kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, sedangkan 7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Tingginya nilai koefisien determinasi merupakan hal yang wajar karena model yang digunakan adalah Fixed Effects Model (FEM), yang mengakomodasi karakteristik tetap masing-masing daerah melalui efek tetap (fixed effects). Oleh karena itu, tingginya nilai koefisien determinasi tidak selalu diikuti oleh signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen pada uji parsial (Baltagi, 2021).

2. Hasil Uji Statistik f (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji Statistik f (Simultan)

<i>F-statistic</i>	48,5510
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,00000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Merujuk pada Tabel 8, hasil pengujian di atas, nilai probabilitas menunjukkan angka 0,0000 dan nilai tersebut di bawah dari nilai kriteria yaitu 0,05. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Hasil Uji t (Parsial)

Pada tahap uji t (parsial) terpilih model FEM dengan hasil sebagai berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t.statistic	Prob.
Costant	1,54090	0,69494	2,21715	0,0378
Pajak Daerah (X1)	-0,57471	0,76183	-0,75438	0,4590
Retribusi Daerah(X2)	-2,11596	2,06514	-1,02460	0,3172
HPKYD (X3)	-18,7091	12,11870	-1,55050	0,1360

Sumber: Data diolah dengan Eviews 2012 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan hasil dari model FEM yang terpilih adalah sebagai berikut :

1. Variabel X1 memiliki nilai prob. (signifikan) sebesar 0,4590 ($>0,05$) , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Variabel X2 memiliki nilai prob. (signifikan) sebesar 0,3172 ($>0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel Y.
3. Variabel X3 memiliki nilai prob. (signifikan) sebesar 0,1360 ($>0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel Y.

Pembahasan

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki koefisien sebesar -0,57471 dengan nilai probabilitas 0,4590 ($>0,05$), sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian, H_1 ditolak dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karouw *et al.*, (2022) dan Barlina *et al.*, (2018) yang juga menemukan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Merujuk pada permasalahan tersebut dapat dipertegas dengan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah, yang menyebutkan:

“Permasalahan lain yang dapat menyebabkan pajak daerah tidak memengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu karena PAD belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan pelayanan publik, kurangnya penguatan ekonomi, optimalisasi pajak dan sosialisasi mengenai pajak, pemanfaatan teknologi pada kabupaten/kota yang belum maksimal, serta peningkatan tata kelola pendapatan daerah yang belum optimal. Selain itu, terdapat hambatan pemerintah dalam mengumpulkan pajak daerah, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak, serta fluktuasi atau naik-turunnya kemampuan ekonomi masyarakat, dan sebagainya”.

Demikian, kemandirian keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan anggaran, kebijakan fiskal, serta penguatan ekonomi daerah.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki koefisien sebesar -2,11596 dengan nilai probabilitas 0,3172 ($>0,05$), sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian, H_2 ditolak dan hasil tersebut sejalan dengan Hey *et al.*, (2023) serta Nainggolan *et al.*, (2023), yang juga menemukan tidak ada pengaruh dari retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut diakibatkan oleh penerimaan retribusi yang kecil dan kurang dari pendapatan transfer pusat, pendapatan provinsi, serta pinjaman. Temuan tersebut selaras dengan hasil wawancara

yang telah dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi, sebagaimana berikut ini:

“Perbedaan karakteristik ekonomi antardaerah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD masih kurang. Penyebab lainnya adalah pengelolaan potensi retribusi daerah yang belum optimal oleh perangkat daerah, sarana prasarana yang masih kurang, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang belum akurat dan transparan menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan retribusi daerah sebagai komponen dari PAD, dan sebagainya”.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki koefisien sebesar -18,7091 dengan nilai probabilitas 0,1360 ($>0,05$), sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Kemudian H_3 ditolak. Temuan empiris ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rizalni & Dona (2023) dan Mulyani & Ramdini (2021), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa daerah kurang memanfaatkan potensi yang ada. Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bahwa:

“Permasalahan tersebut dapat terjadi karena hasil sangat bergantung pada performa BUMD dalam menghasilkan laba usaha yang dapat disetorkan kepada pemerintah daerah; kondisi pasar yang tidak menentu dapat juga menyebabkan kinerja BUMD menurun; serta tata kelola perusahaan yang belum baik dapat menyebabkan kinerja BUMD tidak optimal. Permasalahan juga terjadi karena kurangnya koordinasi dengan UPTD, perangkat daerah kabupaten/kota, perbankan, dan sebagainya. Kemudian, perbedaan geografis, karakteristik daerah dapat menyebabkan potensi HPKYD tiap daerah berbeda. Di sisi lain, kondisi tersebut terjadi karena kurang maksimal dalam menggali potensi di daerah”.

Permasalahan yang ada menyebabkan HPKYD kurang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil regresi data panel, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$). Oleh karena itu, H_4 diterima dan hasil ini sejalan dengan penelitian Siagian & Kurnia (2022) serta teori Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa komponen PAD merupakan indikator dalam mendukung kemandirian keuangan daerah (Kawatu, 2019). Temuan ini juga didukung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang menyatakan:

“Kenaikan PAD merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer provinsi, dan pinjaman. Selanjutnya, peningkatan PAD belum tentu secara langsung mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien, memperkuat perekonomian daerah, mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menjaga keberlanjutan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu diiringi dengan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan fiskal yang tepat, serta pengembangan potensi ekonomi daerah agar kemandirian keuangan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan”.

Hal ini sejalan dengan Theory of Public Finance oleh Musgrave (1959) yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (HPKYD), baik secara parsial maupun simultan, terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2020-2024. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKYD tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan. Hasil uji parsial yang tidak signifikan diduga disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKYD). Selain itu, perbedaan karakteristik dan kapasitas ekonomi antardaerah, belum optimalnya tata kelola pendapatan daerah, serta variasi potensi fiskal masing-masing daerah merupakan bagian yang dapat memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena jumlah daerah yang relatif kecil, hanya 8 daerah saja, dengan lima tahun penelitian, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian, penggunaan tiga variabel independen, yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belum mengakomodasi faktor lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti dana transfer, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah tidak dapat hanya mengandalkan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memerlukan optimalisasi seluruh sumber PAD secara terpadu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, efektivitas pengelolaan anggaran, kebijakan fiskal, penguatan ekonomi daerah, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pendapatan. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi sesuai karakteristik masing-masing daerah menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara individual belum mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, namun secara simultan ketiga variabel tersebut berperan dalam menjelaskan variasi kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan variabel lain, seperti dana transfer, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun kualitas tata kelola pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan daerah, periode dan sebagainya. Hal ini agar dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adilah. (2018). *Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012*. Repository.ub.ad.id.

- Adolpino Nainggolan, Tagor Darius Sidauruk, & Fenny Tito. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Liabilitas*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v8i1.248>
- Algifari. (2021). *Pengolahan Data Penel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan EViews 11*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Amin Nasution, I., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2025). Determinants of local government financial performance: The mediating role of e-government. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 7(3), 353–370. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v7i3.2570s>
- Bany Barlina, Herawati, & Ethika. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat 2012-2016)*.
- Abubakar, Rifa'i. (2020). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, Ustiawaty, J., Sukmana, D. J., Andriani, H., Fatmi, E., Rahmatullah, R., Raushandy, Julian, Dh., & Hikmatullah, N. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hey, K. M., Engka, D. S. ., & Walewangko, E. N. (2023). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No . 7 Agustus 2023 Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No . 7 Agustus 2023*. 23(7), 97–108.
- Hidayah, R. E., & Nur, M. A. (2024). Optimalisasi Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 70–80.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Deepublish.
- Karouw, T. L., S, D., & D, K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dikota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 77–88.
- Mulyani, H. S., & Ayu, S. R. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019*. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Nugraheni, E., Adi, P. H., Kristen, U., & Wacana, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Meta - Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398> ISSN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang IPKD (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Pub. L. No. 105, 4 (2000).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 19 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Perron, P. (2026). *Econometrics Volume 1: Basic Theory and Topics for Cross-Section Data*. World Scientific.
- Prasetyo, A., & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. 2(4), 872–881.
- Reza, M., & Sopiana, Y. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan*

- Pembangunan, 6(1), 477–488. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Richard Abel Musgrave. (1959). *The Theory Of Public Finance: A Study In Public Economy*.
- Saputra, E., Sastrawan, R., & Patria, A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10, 97–106.
- Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- The Effect Of Regional Taxes , Regional Levies , And Results*. 9(5), 3095–3104.
- Toyyib, M. (2023). *Upaya Menilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>